



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **169** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

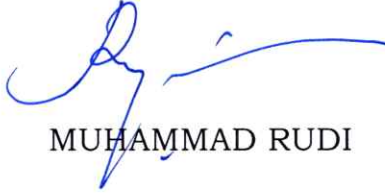
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1509



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#GISA
GERAKAN INDONESIA BAKAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

bangga
melayani
bangsa

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



DUKCAPIL
GO
DIGITAL



Jalan Ir. Sutami Kec. Sekupang, Batam



<https://disdukcapil.batamgo.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta terselesaikannya penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024. Perubahan Renja ini disusun sebagai pedoman dalam menjawab tantangan perubahan yang berjalan begitu cepat agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2024 terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Oleh karena itu penyesuaian dan perubahan diperlukan dalam rangka perbaikan demi perbaikan yang terus dilakukan agar apa yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024.

Batam, 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**



HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024 7

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 19

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 21

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 27

BAB IV. PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 8

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 18

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 20

Tabel 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Tahun 2024 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap komponen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan baik jangka panjang maupun jangka menengah serta visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka perwujudan *good governance* yang mampu menghadirkan *service excellent* (pelayanan prima) di semua lini pelayanan. Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil (*outcome*) yang optimal diperlukan penyusunan program kegiatan yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely)*, sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan bentuk pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja merupakan rencana perubahan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan perubahan RKPD karena adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan.

Perubahan Renja ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Perubahan Renja ini disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dijalankan secara simultan/paralel dengan penyusunan perubahan RKPD serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya dalam menghadirkan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan bagi sektor publik. Perubahan Renja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi renja pada tahun berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta target yang ingin dicapai berkenaan dengan perencanaan yang berbasis kinerja sehingga capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menjadi terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
24. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;

25. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024;
28. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Acara Nomor 1424).

1.3 Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024. Penyesuaian ini menjadi penting disebabkan adanya perbedaan asumsi dan kebijakan serta kondisi yang terjadi selama tahun 2023. Salah satunya, karena terdapat perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

➤ Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada sisa tahun berjalan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. Triwulan II tahun 2024 berdasarkan data laporan pada aplikasi SEPP (Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan) Kota Batam.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan berdasarkan evaluasi renja pada tahun berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta target yang ingin dicapai.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam s.d. Triwulan II Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara spesifik, masalah-masalah yang diidentifikasi mencakup: rendahnya pemanfaatan database kependudukan, ketergantungan pada logistik perekaman dan pencetakan blanko KTP elektronik yang terpusat, keterbatasan sumber daya manusia di daerah hinterland, dan rendahnya pelaporan akta kematian. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kematian. Akar masalah ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi teknologi yang ada dengan implementasinya dalam pelayanan publik.

Implikasi dari permasalahan ini sangat luas. Selain menghambat pelayanan publik yang efektif dan efisien, kondisi ini juga dapat berdampak pada kualitas data kependudukan, perencanaan pembangunan yang tidak akurat, serta potensi terjadinya permasalahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan sistem logistik.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan sebagian besar hasil capaian kinerja program dan kegiatan sudah sesuai target kinerja. Namun berdasarkan evaluasi Renja s.d. Triwulan II ini dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas yang berkembang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan prima serta target yang ingin dicapai berkenaan dengan perencanaan yang berbasis kinerja diperlukan penambahan sub kegiatan. Meskipun disamping itu tetap ada beberapa belanja sub kegiatan yang harus dirasionalisasi berkenaan dinamika ketersediaan anggaran.

Tidak adanya lagi dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK-NF Yanminduk) dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2022 juga menggerus kemampuan APBD dalam membiayai belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional hendaklah dilakukan oleh *stakeholder* terkait dengan memperhatikan isu-isu dan kebutuhan sektoral masing-masing perangkat daerah yang tentu saja berbeda.

Pada tahun anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebesar Rp10.486.243.266,- dari total anggaran sebesar Rp 17.570.377.713,- atau setara dengan 65% dari realisasi program kerja di tahun 2024.

Adapun rincian hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2024 yang dikaitkan terhadap prakiraan tingkat realisasi capaian target Renstra s.d. Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat- an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran- gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine- rja	Rp	Satuan	Kine- rja	Rp	Satuan	Kine- rja	Rp	Kine- rja	Rp	TW1		TW2		Kine- rja	Rp	Kinerj- a	Rp	
														Kine- rja	Rp	Kine- rja	Rp					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persent- ase	100	113,093,143,0 37.00	Persent- ase	100	14,460,369,4 46.00	Persent- ase	100	15,624,721,7 97.00	100	16,055,577,7 83.00	25	2,682,588,7 52.00	65	9,096,403,04 1.00	65	9,096,403,04 1.00	65.00 %	56.66 %	
2.12.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persent- ase	100	73,358,163,35 9.00	Persent- ase	100	11,680,542,0 82.00	Persent- ase	100	12,125,688,4 61.00	100	13,560,418,6 83.00	25	2,358,200,4 33.00	50	7,486,322,87 4.00	50	7,486,322,87 4.00	50.00 %	55.21 %	
2.12.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			73,023,223,35 9.00	Orang	76	11,633,362,08 2.00	Orang/B- ulan	76	12,078,508,46 1.00	91	13,560,418,68 3.00	76	2,358,200,43 3.00	91	7,486,322,874 .00	91	7,486,322,874 .00	100%	55.21 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
2.12.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD			334,940,000.0 0	Dokume n	12	47,180,000.00	dokume n	12	47,180,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	
2.12.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persent ase	100	1,647,564,000 .00	Persent ase	0	0.00	Persent ase	0	187,754,000. 00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	
2.12.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			701,540,000.0 0		0	0.00	Paket	2	41,612,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	Sub Kegiatan ini tidak terrealisa si pada APBD Tahun Anggara n 2024
2.12.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			946,024,000.00		0	0.00	Orang	12	146,142,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	Sub Kegiatan ini tidak terealisasi pada APBD Tahun Anggaran 2024
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	19,761,547,712.00	Persentase	100	383,746,036.00	Persentase	100	693,699,000.00	100	350,580,500.00	25	44,469,240.00	81	234,683,480.00	81	234,683,480.00	81.00%	66.94%	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			82,432,000.00	Paket	1	3,360,000.00	Paket	1	6,481,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%	0.00%	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			17,038,558,175.00	Paket	4	235,591,800.00	Paket	4	390,324,000.00	4	151,658,500.00	0	0.00	100	144,578,400.00	100	144,578,400.00	100.00%	100%	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
		Jumlah Paket Bahan Logistik			188,356,000.00	Paket	2	6,369,000.00	Paket	2	14,363,000.00	2	4,000,000.00	0	0.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
		Kantor yang Disediakan																				
2.12.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			288,586,900.0 0	Paket	2	10,711,500.00	Paket	1	24,883,000.00	3	3,624,000.00	0	0.00	75	2,716,000.00	75	2,716,000.00	100%	75.00 %	
2.12.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2,163,614,637. 00	Laporan	12	127,713,736.0 0	Laporan	12	257,648,000.0 0	12	191,298,000.0 0	25	44,469,240.0 0	50	83,389,080.00	50	83,389,080.00	100.00 %	50.00 %	
2.12.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		Persentase ketersediaa n sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Persent ase	100	6,314,835,000 .00	Persent ase	100	837,070,000. 00	Persent ase	100	948,669,800. 00	100	802,495,800. 00	0	0.00	95	758,100,000. 00	95	758,100,000. 00	95%	94.47 %	
2.12.01.2.0 7.06	Pengadaan Mebel																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0.00	Unit	118	91,820,000.00	Unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%	0.00%	
2.12.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6,314,835,000. 00	Unit	73	745,250,000.0 0	Unit	85	948,669,800.0 0	73	802,495,800.0 0	0	0.00	95	758,100,000.0 0	95	758,100,000.0 0	100%	94.47 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
2.12.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persent ase	100	9,355,514,529 .00	Persent ase	100	1,419,321,57 8.00	Persent ase	100	1,401,260,53 6.00	100	1,171,572,80 0.00	25	258,559,07 9.00	50	539,827,687. 00	50	539,827,687. 00	50%	50.00 %	
2.12.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			460,658,822.0 0	Laporan	1	26,842,636.00	Laporan	1	47,250,000.00	1	40,500,000.00	25	9,993,776.00	50	14,153,776.00	50	14,153,776.00	100%	50.00 %	
2.12.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2,575,504,564. 00	Laporan	4	374,360,537.0 0	Laporan	4	417,900,000.0 0	4	417,900,000.0 0	25	93,322,739.0 0	50	180,431,727.0 0	50	180,431,727.0 0	100%	50.00 %	
2.12.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Laporan	13															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6,319,351,143. 00	Laporan	13	1,018,118,405 .00	Laporan	13	936,110,536.0 0	23	713,172,800.0 0	25	155,242,564. 00	50	345,242,184.0 0	50	345,242,184.0 0	100%	50.00 %	
2.12.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Persentase ketersediaa n Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas/jabat an	Persent ase	100	2,655,518,437 .00	Persent ase	50	139,689,750. 00	Persent ase	100	267,650,000. 00	100	170,510,000. 00	25	21,360,000. 00	50	77,469,000.0 0	50	345,242,184. 00	50.00 %	100.0 0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
2.12.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			215,753,000.0 0	Unit	1	38,747,000.00	Unit	1	39,780,000.00	1	39,780,000.00	15	6,000,000.00	50	19,147,000.00	50	19,147,000.00	100%	50.00 %	
2.12.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			873,546,000.0 0	Unit	8	78,642,750.00	Unit	4	139,400,000.0 0	4	106,050,000.0 0	15	15,000,000.0 0	50	47,000,000.00	50	47,000,000.00	100.00 %	50.00 %	
2.12.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			503,949,650.0 0	Unit	36	20,860,000.00	Unit	129	86,970,000.00	92	23,180,000.00	0	0.00	50	10,602,000.00	50	10,602,000.00	54.35 %	50.00 %	
2.12.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1,062,269,787. 00	Unit	1	1,440,000.00	Unit	1	1,500,000.00	2	1,500,000.00	25	360,000.00	50	720,000.00	50	720,000.00	100%	50.00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat- an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																					
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase	100	2,321,885,621.00	Persentase	100	1,108,450,300.00	Persentase	87	1,667,179,000.00	87	1,421,971,000.00	25	0.00	100	1,306,735,300.00	100	1,306,735,300.00	100.00%	100.00%	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																					
		Persentase penduduk non permanen dan rentan yang dilayani administrasi kependudukan sesuai ketentuan	Persentase	100	2,005,264,854.00	Persentase	100	1,059,271,300.00	Persentase	100	1,609,471,000.00	100	1,421,971,000.00	25	0.00	100	1,306,735,300.00	100	1,306,735,300.00	100.00%	100.00%	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			466,464,000.00	Dokumen	12	34,316,300.00	Dokumen	12	51,001,000.00	12	51,001,000.00	0	0.00	100	46,285,300.00	100	46,285,300.00	100.00%	100.00%	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas			1,538,800,854.00	Dokumen	1200	1,024,955,000.00	Dokumen	1350	1,558,470,000.00	1350	1,370,970,000.00	46960	0.00	82334	1,260,450,000.00	82334	1,260,450,000.00	60.99%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat- an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran- gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine- rja	Rp	Satuan	Kine- rja	Rp	Satuan	Kine- rja	Rp	Kine- rja	Rp	TW1		TW2		Kine- rja	Rp	Kinerj- a	Rp	
														Kine- rja	Rp	Kine- rja	Rp					
		Pendaftaran Penduduk																				
2.12.02.2. 03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																					
		Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan	Persent- ase	100	316,620,767.0 0	Persent- ase	100	49,179,000.0 0	Persent- ase	100	57,708,000.0 0	100	0.00	0	0.00	100	0.00	100	0.00	100%	100.0 0%	
2.12.02.2.0 3.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																					
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			316,620,767.0 0	Laporan	1	49,179,000.00	Laporan	1	57,708,000.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0%	0.00%	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																					
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Persent- ase	100	1,794,184,343 .00	Persent- ase	98.5	181,052,207. 00	Persent- ase	98.5	361,807,800. 00	99	85,629,250.0 0	25	0.00	96	76,557,025.0 0	95.5 7	76,557,025.0 0	97.03 %	100.0 0%	
2.12.03.2. 01	Pelayanan Pencatatan Sipil																					
		Persentase penduduk yang dilayani dokumen catatan sipil sesuai ketentuan	Persent- ase	100	1,477,563,577 .00	Persent- ase	100	138,022,000. 00	Persent- ase	100	56,151,000.0 0	100	56,121,250.0 0	25	0.00	50	49,605,000.0 0	50	49,605,000.0 0	50.00 %	100.0 0%	
2.12.03.2.0 1.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp	
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp					
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			1,477,563,577.00	Dokume n	3600 0	138,022,000.00	Dokume n	3800 0	56,151,000.00	3800 0	56,121,250.00	7685	0.00	1594 8	49,605,000.00	1594 8	49,605,000.00	41.97 %	100.00 %	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																					
		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil	Persent ase	100	316,620,766.00	Persent ase	0	43,030,207.00	Persent ase	100	305,656,800.00	100	29,508,000.00	0	0.00	100	26,952,025.00	100	26,952,025.00	100%	100.00%	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																					
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			316,620,766.00	Laporan	1	43,030,207.00	Laporan	1	305,656,800.00	1	29,508,000.00	0	0.00	1	26,952,025.00	1	26,952,025.00	100%	100.00%	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																					
		Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Persent ase	100	1,005,738,287.00	Persent ase	100	40,669,386.00	Persent ase	48	153,373,000.00	48	7,199,680.00	0	0.00	100	6,547,900.00	100	6,547,900.00	100.00%	100.00%	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																					
		Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	Persent ase	100	702,925,435.00	Persent ase	100	37,219,386.00	Persent ase	48	56,065,000.00	48	7,199,680.00	0	0.00	100	6,547,900.00	100	6,547,900.00	100%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keteran gan		
1	2	3	4			5			6			7		8				9		10		11		
			Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	TW1		TW2		Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp			
														Kine rja	Rp	Kine rja	Rp							
2.12.04.2.0 1.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan																							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			702,925,435.0 0	Dokume n	6	37,219,386.00	Dokume n	6	56,065,000.00	6	7,199,680.00	0	0.00	100	6,547,900.00	100	6,547,900.00	100%	100.00 %			
2.12.04.2. 03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																							
		Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaata n data penduduk sesuai ketentuan	Persent ase	100	302,812,852.0 0	Persent ase	100	3,450,000.00	Persent ase	100	97,308,000.0 0	100	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%			
2.12.04.2.0 3.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																							
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			302,812,852.0 0	Laporan	1	3,450,000.00	Laporan	1	97,308,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%			
					118,214,951,2 88.00				15,790,541,3 39.00				17,807,081,5 97.00			17,570,377,7 13.00			2,682,588,7 52.00			10,486,243,2 66.00		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Masyarakat;
3. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder.

Adapun target serta indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	88,31	89	90	91	92
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	89%	93%	97%	99%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	21%	34%	48%	100%	100%	100%

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada setiap tahunnya. Disamping melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026, pada Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam jika merencanakan akan menambahkan Sub Kegiatan yang belum tertuang di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024. Hal ini diperlukan karena adanya tuntutan kebutuhan-kebutuhan prioritas yang berkembang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan prima mengingat keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam saat ini.

Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Renja Perubahan tahun ini ada beberapa belanja sub kegiatan yang harus dirasionalisasi berkenaan dinamika ketersediaan anggaran pada APBD Kota Batam Tahun 2024. Oleh karena itu ada beberapa penyesuaian rincian belanja pada Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah diusulkan sesuai dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	15,624,721,797	17,213,207,175	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	12,125,688,461	14,628,910,875	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	91 Orang/bulan	12,078,508,461	14,628,910,875	Hasil Rekon Gaji dan Tunjangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	47,180,000	0	Sub Kegiatan tidak terealisasi pada APBD T.A. 2024
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	187,754,000	0	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	41,612,000	-	Sub Kegiatan tidak terealisasi pada APBD T.A. 2024
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	146,142,000	-	Sub Kegiatan tidak terealisasi pada APBD T.A. 2024
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	693,699,000	447,684,500	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,481,000	0	Sub Kegiatan tidak terealisasi pada APBD T.A. 2024
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	4 Paket	390,324,000	207,428,500	Rasionalisasi Anggaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14,363,000	4,000,000	Rasionalisasi Anggaran
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24,883,000	3,624,000	Rasionalisasi Anggaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	257,648,000	267,378,000	Rasionalisasi Anggaran
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	948,669,800	854,167,800	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	73 Unit	948,669,800	854,167,800	Dukungan Persiapan Pilkada 2024
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,401,260,536	1,077,188,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	47,250,000	40,500,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	417,900,000	417,900,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	936,110,536	618,788,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	267,650,000	170,510,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39,780,000	39,780,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	139,400,000	106,050,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	92 Unit	86,970,000	23,180,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1,500,000	1,500,000	
		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	100%	1,667,179,000	2,055,657,000	
		Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	100%	1,609,471,000	2,051,257,000	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pedataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	51,001,000	65,401,000	Dukungan Persiapan Pilkada 2024

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	Hasil Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	135.000 Dokumen	135.000 Dokumen	1,558,470,000	1,985,856,000	Dukungan Persiapan Pilkada 2024
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 Orang	100 Orang	57,708,000	4,400,000	
		Sosialisasi Pendaftaran penduduk	Sosialisasi Pendaftaran penduduk	Jumlah laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	57,708,000	4,400,000	
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Catatan Sipil	100%	100%	361,807,800	98,679,250	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Catatan Sipil	100%	100%	56,151,000	69,171,250	
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	38.000 Dokumen	38.000 Dokumen	56,151,000	69,171,250	Dukungan Persiapan Pilkada 2024
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Catatan Sipil	100 Orang	100 Orang	305,656,800	29,508,000	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	305,656,800	29,508,000	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna yang Telah Mendapatkan Hak Akses Sesuai Ketentuan	100%	100%	153,373,000	7,199,680	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan PenyajianDatabase Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna yang Telah Mendapatkan Hak Akses Sesuai Ketentuan	48%	100%	56,065,000	0	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	6 Dokumen	56,065,000		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna yang Telah Mendapatkan Hak Akses Sesuai Ketentuan	48%	100 Orang	97,308,000	7,199,680	
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	97,308,000	7,199,680	
TOTAL							17,807,081,597	19,374,743,105	

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Pada sub bab ini diuraikan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada anggaran perubahan tahun 2024. Terdapat berbagai macam sumber pendanaan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa Sumber pendanaan daerah di antaranya adalah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas pada setiap tahunnya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja disusun untuk mengatasi permasalahan dan mengakomodir kebutuhan yang timbul, menangani isu- isu strategis yang sedang terjadi dan tentunya dalam kerangka visi-misi yang serta sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator kinerja serta pendanaan indikatif perubahan tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													16,055,577,783	17,213,207,175	
2	1 2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													16,055,577,783	17,213,207,175	
2	1 2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													13,560,418,683	14,628,910,875	
2	1 2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	76 Orang/bul an	91 Orang/bul an	100%	100%	13,560,418,683	14,628,910,875	DAU, PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Rekon Gaji dan Tunjangan	
2	1 2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokume n	12 Dokume n	100%	100%	0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h		
2	1 2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0			
2	1 2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah		100%	100%					0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1 2	1	2.0 5	9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah		100%	100%					0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1 2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										350,580,500	482,430,500			
2	1 2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h				
2	1	2	1	2.0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					151,658,500	207,428,500	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Dukungan Pelayanan
						Kertas, Tinta Printer, LAN Wifi															
2	1	2	1	2.0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					4,000,000	4,000,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	2	1	2.0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					3,624,000	3,624,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	2	1	2.0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					191,298,000	267,378,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Rakor Ditjen Dukcapil dan Pengambil an Blanko E-KTP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h			
2	1 2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											802,495,800	854,167,800			
2	1 2	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	1 2	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					802,495,800	854,167,800	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Dukungan Jaringan Internet Terpadu Kominfo	
					Laptop, Switch Hub Penunjang Jaringan Internet Terpadu															
2	1 2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,171,572,800	1,077,188,000			
2	1 2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					40,500,000	40,500,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h				
2	1	2	1	2.0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					417,900,000	417,900,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	2	1	2.0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					713,172,800	618,788,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	THL LULUS PPPK 2 Orang
2	1	2	1	2.0	9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										170,510,000	170,510,000			
2	1	2	1	2.0	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					39,780,000	39,780,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h				
2	1	2	1	2.0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					106,050,000	106,050,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	2	1	2.0	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					23,180,000	23,180,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	2	1	2.0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					1,500,000	1,500,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h					
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											1,421,971,000	2,055,657,000					
2	1	2	2.0	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk											1,421,971,000	2,051,257,000					
2	1	2	2.0	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					51,001,000	65,401,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Dukungan Persiapan Pilkada 2024			
					ATK, Kertas dan Cover Penunjang Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
2	1	2	2.0	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					1,370,970,000	1,985,856,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Dukungan Persiapan Pilkada 2024			
					Ribbon/Tinta Printer Cetak KTP-El																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h			
2	1 2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											0	4,400,000			
2	1 2	2	2.0 3	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependuduk an	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependuduk an	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					0	4,400,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Sosialisasi Penduduk Non Permanen Tingkat Kecamatan	
					Sosialisasi terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
2	1 2	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL											85,629,250	98,679,250			
2	1 2	3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil											56,121,250	69,171,250			
2	1 2	3	2.0 1	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					56,121,250	69,171,250	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)	Dukungan Persiapan Pilkada 2024	
					ATK, Kertas dan Cover Penunjang Pelayanan Pencatatan Sipil															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h			
2	1 2	3	2.0 2		Pelayanan Pencatatan Sipil											29,508,000	29,508,000			
2	1 2	3	2.0 2	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					29,508,000	29,508,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		
					Sosialisasi perkait Pelayanan Pencatatan Sipil															
2	1 2	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											7,199,680	7,199,680			
2	1 2	4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan											7,199,680	7,199,680			
2	1 2	4	2.0 1	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatka n hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatka n hak akses sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					7,199,680	7,199,680	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		
					Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebel u m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h					
2	1 2	0	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											0	0					
2	1 2	0	2.0 3	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatka n hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatka n hak akses sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	100%					0	0	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)				
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
TOTAL															17,570,377,713	19,374,743,105						

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari Rancangan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 yang disebabkan karena adanya perkembangan dan ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dengan rencana program dan kegiatan RKPD. Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 ini dengan baik, diharapkan apa yang sudah direncanakan dan menjadi target dapat direalisasikan dengan baik sesuai anggaran yang tersedia. Oleh karena itu kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan dinamika yang berkembang serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah dievaluasi dan disesuaikan dalam rangka memaksimalkan target dan prioritas yang hendak dicapai dengan memperhitungkan penggunaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan. Melalui Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

➤ **Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2023 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka :

1. Perubahan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/ *stakeholders* yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;

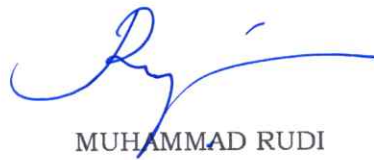
3. Perubahan Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2024;

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, segala kebutuhan anggaran akan disusun dalam skala prioritas penganggaran sehingga proses perencanaan dapat berjalan secara proporsional dengan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026. Pada akhir tahun anggaran 2024 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI